



KABUPATEN  
LUWU TIMUR

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2022

BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dibuat dalam rangka menyesuaikan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain sebagai amanah peraturan perundang-undangan, juga sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2021 sampai dengan 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Periode 2021 sampai dengan 2026.

Dengan selesainya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah (Renja Perubahan BKAD) tahun 2022 ini yang akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Semoga Renja Perubahan BKAD tahun 2022 ini dapat mendorong dan mengarahkan semua Program dan kegiatan mencapai hasil yang baik dan mampu mewujudkan Rencana Strategis BKAD yang telah ditetapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Renjaa ini disampaikan terima kasih atas segala jerih payahnya.



Madi, 29 Juli 2022  
Kepala BKAD Kab. Luwu Timur

Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 197008142002121006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu dan Capain Renstra BPKD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD .....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD .....	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BKAD .....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKAD .....	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD .....	49
3.3 Program dan Kegiatan BKAD .....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD .....	54
BAB V PENUTUP .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	7
Tabel 2.2	Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat .....	17
Tabel 2.3	Program/ Kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan .....	18
Tabel 2.4	Indikator Kinerja BKAD Tahun 2021-2026 .....	21
Tabel 2.5	Target Kinerja, Tujuan dan Sasaran pada Renstra BKAD.....	24
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran dan Indikator BPKD Tahun 2021.....	25
Tabel 2.7	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	26
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan BKAD Tahun 2021 .....	26
Tabel 2.9	Opini BPK RI terhadap LKPD Kab. Luwu Timur Tahun 2017-2021.....	28
Tabel 2.10	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kab. Luwu Timur .....	30
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	50
Tabel 4.1	Alokasi Anggaran Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

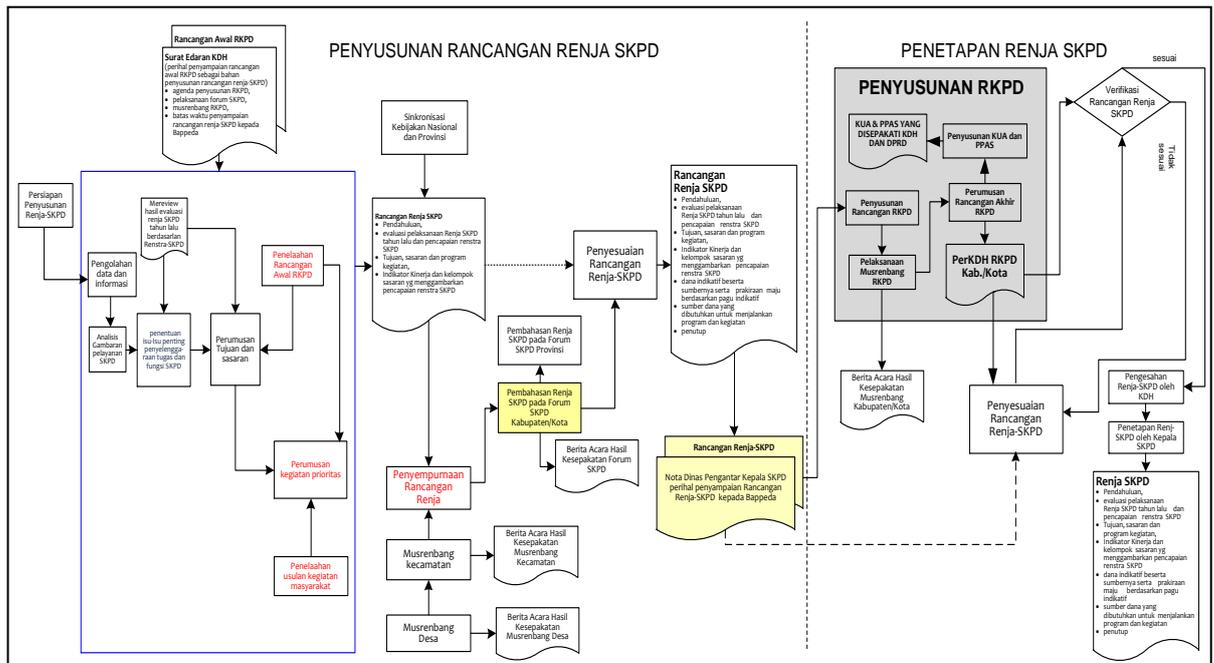
### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan perubahan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan. Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 menyusun Perubahan Rencana Kerja. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 didasarkan pada:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

**Gambar 1**  
**Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021; dan
13. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran;
- b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- d) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- e) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

###### 1.1 Latar Belakang

###### 1.2 Landasan Hukum

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

###### 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

###### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD

	2.2	Analisa Kinerja Pelayanan BPKD
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BKAD
	3.3	Program dan Kegiatan BKAD
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BAB V		PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. Secara umum evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Renja BKAD), dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dan sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD, untuk kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berkaitan dengan telah disusunnya Rencana Kerja OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dan dengan mempertimbangkan perubahan perubahan akibat pergeseran, maka Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah s/d Triwulan II tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD.

Terkait dengan hal tersebut diatas Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2022. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020(tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan	
					Target Renja SKPD 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4		
1	WAJIB											
1	05	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	051	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	0	0	0	0,00	100	50	50
1	051	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	15	0	0	0,00	2	1	7
1	051	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	0	0	0,00	2	-	0

1	0 5	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	0	0	0	0,00	2	-	0
1	0 5	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	50	0	0	0	0,00	10	6	12
1	0 5	0 1	2.0 2		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)</b>	100	0	0	0	0,00	98	50,00	50,00
1	0 5	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	71	0	0	0	0,00	25	25	35
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	95	0	0	0	0,00	95	90	94,74
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (dokumen)	5				0,00	1	1	0
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan (%)	95	0	0	0	0,00	95	-	0
1	0 5	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	95	0	0	0	0,00	19	9	9
1	0 5	0 1	2.0 3		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)</b>	100	0	0	0	0,00	98	50	50
1	0 5	0 1	2.0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (dokumen)	20	0	0	0	0,00	4	2	10
1	0 5	0 1	2.0 5		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</b>	100	0	0	0	0,00	95	50	50

1	05	01	2.05	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)	98	0	0	0	0,00	98	90	92
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	2250	0	0	0	0,00	450	125	6
1	05	02	01	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	234	0	0	0	0,00	46	15	6
1	05	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah (%)</b>	100	0	0	0	0,00	95		0,0
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	120	0	0	0	0,00	5	5	4
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	20				0,00	2	5	25
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	126				0,00	18	18	14
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	15				0,00	3	3	20
1	05	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	720	0	0	0	0,00	48	24	3
1	05	01	2.06	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	12500	0	0	0	0,00	2420	1.230	10
1	05	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1400	0	0	0	0,00	250	120	9

1	0 5	0 1	2.0 7		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi (%)</b>	100	0	0	0	0,00	97	25,00	25,00
1	0 5	0 1	2.0 7	0 1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	100	0	0	0	0,00	15	8	0
1	0 5	0 1	2.0 7	0 6	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	33	0	0	0	0,00	14	-	0
1	0 5	0 1	2.0 7	1 1	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	2	0	0	0	0,00	2	0	0
1	0 5	0 1	2.0 7	0 5	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	43	0	0	0	0,00	7	5	12
1	0 5	0 1	2.0 8		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	100	0	0	0	0,00	100	25,00	25,00
1	0 5	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	30000	0	0	0	0,00	6.000	3.100	10
1	0 5	0 1	2.0 8	0 4	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	189	0	0	0	0,00	24	12	6
1	0 5	0 1	2.0 8	0 2	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	32	0	0	0	0,00	3	2	6
1	0 5	0 1	2.0 9		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	100	0	0	0	0,00	95	25,00	25,00

1	05	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	19	0	0	0	0,00	8	7	37
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	75	0	0	0	0,00	66	11	15
1	05	01	2.09	06	pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	0	0	0	0,00	1	1	100
1	05	02	05	06	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1) Persentase kesesuaian pagu anggaran KUA-PPAS dan APBD (%)	100	0	0	0	0,00	100	25,00	25,00
						(2) Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (%)	100	0			0,00	100	0,00	0,00
						(3) Persentase kemandirian keuangan untuk memenuhi belanja daerah (%)	92	0			0,00	92	0,00	0,00
						(4) Persentase transparansi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (%)	90	0			0,00	90	0,00	0,00
						(5) Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja APBD yang optimal (%)	95	0	0	0	0,00	95	-	0
						(6) Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)	WTP	0	0	0	0,00	WTP		100

1	0	0	2.0		<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (minggu)</b>	10	0	0	0	0,00	10		0,00
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun (dokumen)	10			0	0,00	2	-	0,00
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun (dokumen)	10			0	0,00	2	-	0,00
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)	5			0	0,00	59	-	0,00
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)	5			0	0,00	59	-	0,00
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)	71			0	0,00	71	12	16,90
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD yang disusun yang responsif gender (dokumen)	10			0	0,00	2	-	0,00
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun yang responsif gender (dokumen)	10			0	0,00	3	1	10,00
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang tersusun (dokumen)	75			0	0,00	42	27	36,00



				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi (laporan)	1120			0	0,00	224	59	5,27
				Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester yang disusun (laporan)	90			0	0,00	18	10	11,11
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan (dokumen)	90			0	0,00	18	10	11,11
				Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah dokumen ranperda dan ranperbup yang tersusun (dokumen)	10			0	0,00	2	1	10,00
				Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun (dokumen)	5			0	0,00	1	0	0,00
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun (dokumen)	10			0	0,00	2	0	0,00
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi (laporan)	6			0	0,00	2	1	16,67
				<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (%)</b>				0	0,00	94		#DIV/0!

				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah belanja transfer ke desa (desa)	125	0	0,00	124	124	99,20	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola (dokumen)	15	0	0,00	3	-	0,00	
				<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>		<b>0,00</b>	
				Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik (perangkat daerah)	59	0	0,00	59		0,00	
				penyusunan standar harga	Jumlah dokumen standar harga (dokumen)	10	0	0,00	2	1	10,00	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah (dokumen)	64	0	0,00	2	1	1,56	
				penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun (dokumen)	10	0	0,00	2	1	10,00	
				inventarisasi barang milik daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun (dokumen)	15	0	0,00	2	1	6,67	
				pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan (laporan)	20	0	0,00	2	1	5,00	
				penilaian barang milik daerah	jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun (dokumen)	10	0	0,00	2	-	0,00	

					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian (dokumen)	20			0	0,00	2	-	0,00	
					Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang optimal (dokumen)	10			0	0,00	2	1	10,00	
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan (laporan)	5			0	0,00	2	1	20,00	
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun (laporan)	5			0	0,00	1	1	20,00	
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota (laporan)	10			0	0,00	2	0	0,00	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat**

No	Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Masih adanya pembatasan tatap muka untuk pelaksanaan rapat, sehingga sosialisasi tidak optimal
2	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Harga komponen material dalam RAB sudah tidak sesuai dengan harga komponen material 2021, sehingga akan dilakukan reuiu hps
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Adanya penyesuaian jumlah kendaraan yang dipelihara sehingga tidak optimal
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Beberapa agenda koordinasi luar daerah luar provinsi tak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penundaan penetapan Perda pengelolaan keuangan daerah di tahun 2021 dan kegiatan koordinasi yang diselenggarakan secara virtual
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
7	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
8	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Anggaran disediakan untuk dana darurat

Berdasarkan tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar kegiatan yang terhambat kinerjanya sehingga tidak memenuhi target kinerja berkaitan dengan pembatasan tatap muka diakibatkan penyebaran virus Covid-19.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Keberhasilan
	WAJIB	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (dokumen)
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (dokumen)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (dokumen)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi (%)
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)
	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)
	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)
	pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1) Persentase kesesuaian pagu anggaran KUA-PPAS dan APBD (%)
		(2) Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (%)
		(3) Persentase kemandirian keuangan untuk memenuhi belanja daerah (%)
		(4) Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja APBD yang optimal (%)
		(5) Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (minggu)
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun (dokumen)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun (dokumen)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota (laporan)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi (laporan)
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah di rekonsiliasi (laporan)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi (laporan)
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi (laporan)
	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester yang disusun (laporan)
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan (dokumen)
	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah dokumen ranperda dan ranperbup yang tersusun (dokumen)
	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun (dokumen)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Keberhasilan
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun (dokumen)
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi (laporan)
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (%)
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah belanja transfer ke desa (desa)
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)
	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik (perangkat daerah)
	penyusunan standar harga	Jumlah dokumen standar harga (dokumen)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah (dokumen)
	penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun (dokumen)
	inventarisasi barang milik daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun (dokumen)
	pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan (laporan)
	penilaian barang milik daerah	jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun (dokumen)
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian (dokumen)
	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang optimal (dokumen)
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan (laporan)
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun (laporan)
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota (laporan)

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa faktor keberhasilan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah serta tercapainya indikator kinerja disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman.
2. Pembiayaan yang cukup dan tersedia secara tepat waktu.
3. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai.
4. Adanya sinergi dan kerjasama yang baik antar unit kerja.
5. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan konsisten.
6. Terpenuhinya kebutuhan dan harapan masyarakat.
7. Kultur dan budaya organisasi yang baik.
8. Adanya pengawasan dan monitoring yang efektif.
9. Adanya motivasi dan semangat kerja yang tinggi.
10. Adanya inovasi dan penerapan teknologi yang sesuai

### 2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2021-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	Hari	60	60	60	60	60	60
2	Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu	Hari	80	80	80	80	80	80

Pada tabel 2.4 Indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2021-2026 diatas dapat dijelaskan bahwa Persetujuan Bersama Ranperda dan Ranperbup APBD Tepat Waktu adalah suatu kondisi dimana proses penyetujuan Rencana Perencanaan Daerah (Ranperda) dan Rencana Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah (Ranperbup) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini penting dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tepat waktu adalah suatu keadaan

dimana pemerintah daerah menyampaikan LKPD-nya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tepat waktu. Ini penting dilakukan agar BPK RI dapat melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas keuangan pemerintah daerah secara tepat waktu dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar yang ditentukan. Penyampaian LKPD yang tepat waktu juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

### **2.1.2 Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Capaian Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tahun-tahun yang lalu mempunyai arah kebijakan yang akan diambil dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi:

1. Kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dalam proses penyusunan maupun pertanggungjawaban APBD;
2. Kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
3. Kebijakan pengembangan aparatur.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Analisis Kinerja Perangkat Daerah adalah suatu proses evaluasi atas performa dan hasil yang dicapai oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah memenuhi harapan dan tujuan yang telah ditetapkan, memperbaiki kinerja yang kurang

efektif, dan memastikan bahwa perangkat daerah dapat berfungsi secara optimal. Analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja perangkat daerah, serta melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dengan Visi “*Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*” adapun kemudian BKAD mengemban misi ke 4, yaitu “terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik” dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani dan sasarannya meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu dan Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu, maka dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkannya tiga program pada RPJMD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kedudukan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran Daerah;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan Daerah;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengertian Pengelolaan Keuangan yang meliputi tata kelola pendapatan daerah, penatausahaan keuangan dan manajemen pemanfaatan barang milik daerah, dinyatakan sebagai proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Untuk menjalankan fungsinya dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi bagi terlaksananya program dan kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Bidang-bidang tersebut meliputi:

- a. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan keuangan daerah
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah

Analisis Kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada berbagai standar, kriteria, dan indikator yang telah ditentukan, seperti:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berlaku

Analisis kinerja juga berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, serta memperhatikan aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Adapun target kinerja tujuan dan sasaran pada RENSTRA BKAD sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada**  
**Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2021-2026**

MISI 4	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
Menciptakan Pemerintahan Dan Pelayanan	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Publik Yang Lebih Baik	Yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	Hari	60	60	60	60	60	60
			Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu	Hari	80	80	80	80	80	80
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,95	63,00	63,50	63,90	64,00	64,20
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persen	95	96	97	98	99	100

Dari tabel 2.5 diatas merupakan target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan kondisi awal target pada tahun 2021 memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI, Pelaksanaan persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu dalam kurun waktu maksimal 60 hari, dan penyampaian LHP BPK RI tepat waktu dalam kurun waktu 80 hari kerja.

Selain itu juga, Tahun 2021 ditargetkan mendapatkan Nilai SAKIP Perangkat daerah sebesar 62,95 poin, dan persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 95%.

Analisis kinerja dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa perangkat daerah dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi harapan masyarakat. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021**

<b>Tujuan</b>	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>Indikator Kinerja</b>	Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Data pada Tabel 2.6 diatas adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Tahun 2021 mengikuti Renstra BPKD Tahun 2006-

2021 disebutkan tujuan perangkat daerah adalah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dengan sasaran kinerja meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikator keberhasilan kinerja yakni cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk menghitung Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dengan menggunakan Sasaran dan Indikator Kinerja yang baru, menggunakan Formulasi Perhitungan seperti berikut :

Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :  $K1+K2+K3/3$ .

K1 : Realisasi Pendapatan Tahun n/ target pendapatan tahun n x 100%

K2 : Realisasi Total APBD Tahun n/ target total APBD tahun n x 100%

K3 : Jumlah OPD tertib administrasi aset Tahun n/ total OPD tahun n x 100%

Capaian Realisasi Kinerja :  $K1+K2+K3/3$

**Tabel 2.7**  
**Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021**

IKU	Uraian	Realisasi	Capaian realisasi Kinerja
K1	Realisasi Pendapatan Tahun 2021 / target pendapatan tahun 2021 x 100%	100,22%	$\frac{100,22\% + 94,47\% + 100\%}{3} = 98,22\%$
K2	Realisasi Total APBD Tahun 2021 / target total APBD tahun 2021 x 100%	94,47%	
K3	Jumlah OPD tertib administrasi aset tahun 2021/total OPD tahun 2021 x 100%	100%	

Pada Tabel 2.7 diatas, dapat dijelaskan dengan menggunakan Formulasi yang ada, dimana K1 capaian realisasinya mencapai 100,22 persen, K2 Capaian realisasinya mencapai 94,47 persen dan K3 capaian Realisasinya 100%. Sehingga untuk Capaian Realisasi Kinerja mencapai 98,22 persen dengan kategori berhasil.

**Tabel 2.8**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021**

MISI 4	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	Persen (%)
Menciptakan Pemerintahan Dan Pelayanan	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	100%

Publik Yang Lebih Baik		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	Hari	60	31	151%
			Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu	Hari	80	80	100%
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,95	65,07	103,37%
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persen	95	100	105

Berdasarkan tabel 2.7 dan tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2021 masih terdapat peralihan Rencana Strategis (Renstra) dari tahun 2006-2021 ke tahun 2021-2026 sehingga ada perubahan target kinerja tujuan dan sasaran pada rencana strategis pada Renstra BKAD Tahun 2021-2026.

Perubahan target kinerja pada Renstra perangkat daerah mengikuti Visi dan Misi Bupati Luwu Timur yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Perubahan target kinerja harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada analisis yang matang, untuk memastikan bahwa perangkat daerah tetap bisa mencapai tujuannya dan memenuhi harapan masyarakat.

Memastikan keuangan daerah memenuhi standar pelaporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) perlu memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur (BKAD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan informasi keuangan pemerintah daerah, berperan sebagai pengelola data dan sumber informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah. BKD memiliki tugas memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan menyediakan informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah. Adapun predikat yang diraih pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.9**  
**Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)**  
**terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021**

TAHUN	OPINI
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber : Opini BPK RI*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2017-2021 Opini atas Laporan Keuangan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dilanjutkan selama 5 Tahun berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Ini membuktikan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam hal ini, opini BPK RI "wajar tanpa pengecualian (WTP)" menunjukkan bahwa hasil audit keuangan oleh BPK tidak menemukan masalah atau kecurangan dalam laporan keuangan yang diperiksa, dan bahwa laporan keuangan tersebut memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku. Ini berarti bahwa BPK mempercayai bahwa laporan keuangan tersebut menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dengan benar dan akurat, tanpa pengecualian.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD yang diamanatkan telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, memenuhi standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang kompeten dan profesional, dengan adanya kekurangan tersebut juga dapat menghambat tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Koordinasi dan sinergi: Kurangnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan: Kegiatan ini terkadang berjalan lambat diakibatkan perangkat daerah belum optimal dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Keterbukaan dan transparansi: Perangkat daerah harus memastikan bahwa tugas dan fungsi mereka dilakukan dengan transparan dan terbuka, untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
5. Pemeriksaan dan evaluasi: Kegiatan ini perlu dipastikan bahwa tugas dan fungsi mereka senantiasa diperiksa dan dievaluasi untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Badan Keuangan dan Aset Daerah

Review terhadap rancangan awal Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap dokumen rancangan awal tersebut. Tujuan dari review ini adalah untuk memastikan bahwa rancangan awal Badan Keuangan dan Aset Daerah

sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, dan memenuhi standar dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam review terhadap rancangan awal Badan Keuangan dan Aset Daerah, beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:

1. Konsep dan prinsip dasar pengelolaan keuangan dan aset daerah, seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
2. Kebijakan dan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Standar dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, seperti prinsip perencanaan dan penganggaran yang baik, serta pengelolaan aset yang berkesinambungan dan bermakna.
4. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat, seperti kebutuhan akan pelayanan publik yang baik, dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,30	58,622,985,310	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,30	35,125,735,397	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	340,000,000	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	156,089,000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	69,082,000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1	3,027,000	
4.	Koordinasi dan		Jumlah dokumen DPA SKPD yang	2	30.000.000	Koordinasi dan		Jumlah dokumen DPA SKPD yang	1	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		disusun tepat waktu			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		disusun tepat waktu			
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10	80,980,000	
<b>b</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)</b>	<b>98</b>	<b>55,117,498,541</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)</b>	<b>98</b>	<b>33,018,480,197</b>	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	46	54,677,498,541	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	46	32,480,750,197	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah SPJ yang diverifikasi (dokumen)	7000	160.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	100	146,040,000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1	102,850,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	0	0	Kegiatan ini diambil alih oleh bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKP		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	19	280.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKP		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	19	288,840,000	
c	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)</b>	<b>98</b>	<b>24,000,000</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)</b>	<b>98</b>	<b>17,090,000</b>	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	24.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun	4	17,090,000	
e	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase Rara- rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian</b>	<b>95</b>	<b>484,810,000</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase Rata- rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian</b>	<b>95</b>	<b>458,940,500</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			<b>Perangkat Daerah (%)</b>					<b>Perangkat Daerah (%)</b>			
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (persen)	98	77,230,000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	450	85.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti peraturan perundang-undangan (orang)	1.125	62,900,500	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, workshop, seminar	44	299.180.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	50	318,810,000	
F	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	<b>95</b>	<b>976,978,425</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	<b>95</b>	<b>731,450,200</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	4	14,978,425	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5	15,495,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			kantor yang tersedia					kantor yang disediakan (jenis)			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	1	1,075,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	22	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	18	9,959,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	48,000,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exampler)	132	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exampler)	144	15,720,000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu yang disediakan (kotak)	6250	90.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	1210	54,450,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	250	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	253	586,751,200	
8.	<b>KEGIATAN PENGADAAN</b>		<b>Persentase BMD-PD penunjang</b>	<b>97</b>	<b>759,200,000</b>	<b>KEGIATAN PENGADAAN</b>		<b>Persentase BMD-PD penunjang</b>	<b>97</b>	<b>344,950,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	<b>BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>yang terpenuhi (%)</b>			<b>BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>yang terpenuhi (%)</b>			
1	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	15	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	18	53,000,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unt)	14	83,750,000	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	494.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan	1	142,000,000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7	15.200.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan (unit)	18	66,200,000	
h	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>506,910,690</b>	<b>KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>348,710,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang	24	40,910,690	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	6000	78,325,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			diadministrasikan (dokumen)								
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi dan listrik yang terbayarkan	36	282.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	24	58,800,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	5	184.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	3	40,800,000	
i	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>95</b>	<b>328,000,000</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>95</b>	<b>220,810,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	10	48,120,000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69	88,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	66	62,690,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang diperlihara (unit)	2	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (unit)	1	110,000,000	
B	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96,70	204,032,352,833	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96,70	316,687,842,544	
a	<b>KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH</b>		Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	1,427,023,383	<b>KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH</b>		Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	1,509,767,349	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	70,458,722	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	95,339,158	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	65,586,968	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	87,883,368	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	1	19,776,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah dokumen verifikasi DPA yang diverifikasi	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah dokumen verifikasi DPA yang diverifikasi	1	19,024,606	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA perubahan yang diverifikasi	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA perubahan yang diverifikasi	1	19,024,606	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2	555,616,670	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	2	521,535,957	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Perda Perubahan dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2	543,361,811	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2	531,250,082	
8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	15	59,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	42	138,472,200	
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan	4	94,350,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan	4	57,236,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			anggaran belanja daerah					anggaran belanja daerah			
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota (laporan)	5	20,224,572	
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Persen)	97	955,500,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Persen)	97	381,366,000	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi (laporan)	36	143,921,000	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan		Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)	12	175,772,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Dana Transfer Lainnya					Dana Transfer Lainnya					
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah direkonsiliasi (laporan)	2.000	61,673,000	
c	<b>KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)</b>	<b>97</b>	<b>955,500,000</b>	<b>KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)</b>	<b>97</b>	<b>1,153,415,105</b>	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah SPM yang diverifikasi dan SP2D yang diterbitkan	18.500	221,800,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi (dokumen)	12	75,936,000	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi (dokumen)	224	42,666,000	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan,	16	155.000.000	Koordinasi Penyusunan		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan,	18	248,485,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	gjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		triwulanan dan semesteran yang disusun			Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		triwulanan dan semesteran yang disusun (dokumen)			
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	12	99.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	18	126,787,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan		Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun (dokumen)	2	439,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan		Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun (dokumen)	2	475,288,580	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	40,200,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP yang tersusun (dokumen)	1	33,042,000	
8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dokumen)	2	31,218,500	
9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi (laporan)	2	117,930,000	
d	<b>PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN</b>		<b>Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang</b>	<b>95</b>	<b>201,649,829,450</b>	<b>KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN</b>		<b>Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang</b>	<b>95</b>	<b>313,643,294,090</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	<b>KEUANGAN DAERAH</b>		<b>tersalurkan (Persen)</b>			<b>KEUANGAN DAERAH</b>		<b>tersalurkan (Persen)</b>			
3	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah		Jumlah belanja transfer ke desa	127	195,149,829,450	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah		Jumlah belanja transfer ke desa (desa)	124	310,143,294,090	
4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah kejadian yang tidak terduga	1	6.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola (dokumen)	3	3,500,000,000	
C	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)</b>	<b>58</b>	<b>593,600,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)</b>	<b>58</b>	<b>828,839,316</b>	
a.	<b>KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)</b>	<b>90</b>	<b>593,600,000</b>	<b>KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)</b>	<b>90</b>	<b>828,839,316</b>	
1	Penyusunan Standar Harga		Jumlah dokumen standar harga disusun	2	41,200,000	Penyusunan Standar Harga		Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (dokumen)	2	35,297,000	
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan					Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan		Jumlah dokumen SBMD dan SKBMD yang	2	30,793,015	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		tersusun (dokumen)			
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah (dokumen)	2	30,816,400	
4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan berita acara pengelolaan barang milik daerah yang dibuat (laporan)	1	35,715,003	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan	2	189,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun (dokumen)	2	90,468,876	
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun	2	60,200,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun (dokumen)	2	31,953,120	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBMD	2	111,100,000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan (laporan)	4	45,456,380	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
8	Penilaian Barang Milik Daerah		JUmlah dokumen penilaian barang milik daerah yang disusun	2	85,100,000	Penilaian Barang Milik Daerah		JUmlah dokumen penilaian BMD yang disusun (dokumen)	2	74,925,000	
9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian (dokumen)	2	34,728,000	
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Persentase nilai BMD yang dihapus	90	106,500,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD yang optimal (dokumen)	2	209,839,500	
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan (laporan)	2	30,223,975	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2	30,959,450	
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan	1	214,195,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemerintah Kabupaten/Kota					Pemerintah Kabupaten/Kota		barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota (laporan)			
	<b>Jumlah</b>				<b>266,468,038,143</b>	<b>Jumlah</b>				<b>352,642,417,257</b>	

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dokumen Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah memerlukan telaahan terhadap kebijakan nasional, untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang direncanakan sesuai dengan arah dan prioritas nasional serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Telaahan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang direncanakan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah harus memperhatikan kebijakan nasional dan memastikan bahwa program dan anggaran yang diterapkan sesuai dengan kebijakan nasional. Telaah Kebijakan Nasional membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengevaluasi apakah Rencana Kerja mereka sesuai dengan arah dan panduan kebijakan nasional, sehingga dapat memastikan bahwa Rencana Kerja mereka akan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan demikian, telaah kebijakan nasional sangat penting bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja mereka yang sesuai dengan arah dan panduan pemerintah nasional.

Berikut adalah arah dan kebijakan nasional pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020:

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah: Permendagri 77 Tahun 2020 menekankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
2. Sistem Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah: Permendagri 77 Tahun 2020 memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang efektif dan efisien, serta melaporkan hasil pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.
3. Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil: Permendagri 77 Tahun 2020 memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan

dana alokasi umum dan dana bagi hasil, serta melaporkan hasil pengelolaan dana tersebut.

4. Penatausahaan Keuangan Daerah: Permendagri 77 Tahun 2020 memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam menatausahakan keuangan daerah, meliputi penerimaan, pengeluaran, dan penatausahaan aset.
5. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah: Permendagri 77 Tahun 2020 memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, Permendagri 77 Tahun 2020 memberikan garis besar inti bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Jangka Menengah (Renja) perangkat daerah mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, dan standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Renja perangkat daerah juga mengacu pada prioritas nasional dan rencana strategis pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerintahan daerah.

Renja perangkat daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Renja perangkat daerah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pemerintahan daerah, seperti kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah harus memberikan arah bagi pembangunan dan pemerintahan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa pembangunan dan pemerintahan daerah berlangsung secara merata dan inklusif di seluruh wilayah daerah.

Adapun tujuan dan sasaran telah dijelaskan pada rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran pada**  
**Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah**

MISI 4	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN SASARAN
Menciptakan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa misi yang diemban Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Rencana Menengah Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur yaitu menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel telah sesuai dengan arah dan kebijakan nasional mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan BKAD

Program dan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun nomenklatur pada program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari tabel 3.2 di atas dijelaskan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 3 program, antara lain Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu Badan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki 12 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan.

### **3.3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) BKAD Kab. Luwu Timur Tahun 2022, tidak terdapat kegiatan lanjutan dari tahun 2021.

### **3.3.2 Penghapusan Kegiatan**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan BKAD Tahun 2022, terdapat kegiatan yang dihapus yaitu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran sebesar Rp.89.130.000,-. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan telah diambil alih pada bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **3.3.3 Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif**

Pada penyusunan Rencana Kerja Perubahan BKAD Tahun 2022, tidak terdapat penambahan Kegiatan.

### **3.3.4 Pagu Indikatif**

Pagu Indikatif sebelum perubahan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.349.524.028.440,- dan setelah perubahan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.352.642.417.257,- Dengan demikian selisih kurang sebesar Rp. 3.118.388.817,-.

### **3.3.5 Lokasi**

Dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022, tidak terdapat perubahan lokasi pada program dan kegiatan.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD**

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur direncanakan melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.352.642.417.257,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN 2022**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah
	<b>TOTAL</b>	<b>349,524,028,440</b>	<b>352,642,417,257</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>32,731,426,554</b>	<b>35,125,735,397</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>156,089,000</b>	<b>156,089,000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,082,000	69,082,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3,027,000	3,027,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3,000,000	3,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,980,000	80,980,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>30,509,261,354</b>	<b>33,018,480,197</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29,824,281,354	32,480,750,197
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177,460,000	146,040,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	129,550,000	102,850,000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	89,130,000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	288,840,000	288,840,000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17,090,000</b>	<b>17,090,000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17,090,000	17,090,000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>465,940,500</b>	<b>458,940,500</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	84,230,000	77,230,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62,900,500	62,900,500
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	318,810,000	318,810,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>707,160,200</b>	<b>731,450,200</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,495,000	15,495,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,175,000	1,075,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,959,000	9,959,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,000,000	48,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	13,920,000	15,720,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54,450,000	54,450,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563,161,200	586,751,200
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>381,950,000</b>	<b>344,950,000</b>
	Pengadaan Mebel	49,000,000	53,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83,750,000	83,750,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	142,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,200,000	66,200,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>323,125,500</b>	<b>177,925,500</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78,325,500	78,325,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204,000,000	58,800,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40,800,000	40,800,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170,810,000</b>	<b>220,810,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,120,000	48,120,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>315,963,762,570</b>	<b>316,687,842,544</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1,444,051,665</b>	<b>1,509,767,349</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95,349,644	95,339,158
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	87,874,740	87,883,368
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	19,776,600	19,776,600
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	19,024,606	19,024,606
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	19,024,606	19,024,606
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	480,321,586	521,535,957
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	506,746,911	531,250,082
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	138,472,200	138,472,200
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57,236,200	57,236,200
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20,224,572	20,224,572
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>280,356,000</b>	<b>381,366,000</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	70,471,000	143,921,000
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	148,212,000	175,772,000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	61,673,000	61,673,000
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1,042,231,505</b>	<b>1,153,415,105</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	77,036,000	75,936,000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	47,026,000	42,666,000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	169,275,295	248,485,000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	115,077,000	126,787,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	435,731,580	475,288,580
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33,045,105	33,042,000
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	33,280,525	33,280,525
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	131,760,000	117,930,000
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>313,197,123,400</b>	<b>313,643,294,090</b>
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	309,697,123,400	310,143,294,090
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3,500,000,000	3,500,000,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>828,839,316</b>	<b>828,839,316</b>
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>828,839,316</b>	<b>828,839,316</b>
	Penyusunan Standar Harga	35,297,000	35,297,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30,793,015	30,793,015
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	90,468,876	90,468,876
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	31,953,120	31,953,120
	Pengamanan Barang Milik Daerah	45,456,380	45,456,380
	Penilaian Barang Milik Daerah	74,925,000	74,925,000
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	34,728,000	34,728,000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	209,839,500	209,839,500
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30,223,975	30,223,975
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30,959,450	30,959,450
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	214,195,000	214,195,000

## BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja adalah suatu proses pembaruan atau perubahan yang dilakukan terhadap Rencana Kerja perangkat daerah yang sudah disusun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperbarui program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan memastikan bahwa Rencana Kerja sesuai dengan kondisi dan perkembangan terbaru. Perubahan Rencana Kerja biasanya dilakukan jika terjadi perubahan dalam prioritas atau sumber daya yang tersedia.

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mewujudkan visi *“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS KAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”*.

Rencana Kerja ini didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Visi Pemerintah Daerah yang tertuang pada RPJMD dan di jabarkan pada Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan, untuk menjadi pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Disamping itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat mengatur arah perkembangannya dalam pencapaian hasil yang diharapkan selain dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Mallu, 29 Juli 2022  
Kepala BKAD Kab. Luwu Timur



Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 197008142002121006